

Karakteristik Kelembagaan dan Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Pekanbaru: Pendekatan Multisektor

Afriyanni Afriyanni¹, Azmansyah Azmansyah², Nugraheni Restu Kusumaningrum³

¹Balitbang Kota Pekanbaru, Pekanbaru, Indonesia. Email: afriyannisubhan@gmail.com

²Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia. Email: azman@eco.uir.ac.id

³Balitbang Kota Pekanbaru, Pekanbaru, Indonesia. Email: henni.mendrova@gmail.com

Artikel Diterima: (15 Juni 2024)

Artikel Direvisi: (19 Juni 2024)

Artikel Disetujui: (28 Juni 2024)

ABSTRACT

This study aims to identify the institutional characteristics of the creative economy in Pekanbaru City, identify the obstacles faced, and formulate strategies to strengthen the institutions of the creative economy sector. This study used qualitative descriptive approach and questionnaire data collection techniques, in-depth interviews, and documentation studies. Data analysis combines descriptive analysis and SWOT analysis. The results of the study revealed issues concerning organizational legality, licensing, capital, and insufficient government support, which hinder the development of creative economy institutions in Pekanbaru City. The study recommends enhancing the role of local governments, particularly the relevant Regional Apparatus Work Units (SKPD), in providing assistance, coaching, and education to creative economy practitioners. Specifically, efforts should focus on improving the legality of products and institutions, enhancing business licensing services and facilitation, encouraging and facilitating cooperation and collaboration among creative economy actors, and establishing a valid and up-to-date creative economy database.

Keywords: Creative Economy, Government Support, Institutional Development

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik kelembagaan ekonomi kreatif di Kota Pekanbaru, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan merumuskan strategi untuk memperkuat kelembagaan sektor ekonomi kreatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data kuesioner, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Analisis data menggabungkan analisis deskriptif dan analisis SWOT. Hasil penelitian mengungkapkan adanya permasalahan dalam legalitas organisasi, perizinan, permodalan, dan dukungan pemerintah yang belum optimal bagi pengembangan kelembagaan ekonomi kreatif di Kota Pekanbaru. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan peran pemerintah daerah khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam melakukan pendampingan, pembinaan dan edukasi kepada pelaku ekonomi kreatif terutama dalam hal legalitas produk dan kelembagaan, meningkatkan pelayanan dan fasilitasi perizinan usaha, mendorong dan memfasilitas kerjasama dan kolaborasi pelaku ekonomi kreatif serta membangun database ekonomi kreatif yang *valid* dan *up to date*.

Kata Kunci: Ekonomi Kreatif, Dukungan Pemerintah, Pengembangan Kelembagaan

Penulis Koresponden:

Nama : Afriyanni

Email : afriyannisubhan@gmail.com

Pendahuluan

Ekonomi Kreatif memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan global. Ekonomi kreatif selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan ekraf merupakan perangkat kebijakan yang memelihara pengembangan kreativitas, penggabungan pengetahuan, dan pemanfaatan teknologi ilmiah canggih untuk menumbuhkan ekspansi ekonomi, membangun peluang pasar, dan menciptakan prospek lapangan kerja (Sung, 2015). Defenisi ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang mendefenisikan ekonomi kreatif sebagai nilai tambah kekayaan intelektual dari kekayaan intelektual yang berasal dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

Ekraf berkontribusi terhadap PDB, lapangan kerja dan ketahanan ekonomi (Hendrawan, 2022; Mabur et al., 2023). Menurut data dari BPS, ekonomi kreatif memberikan kontribusi sekitar 7,24% terhadap ekonomi nasional pada tahun 2017, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,06%. Sementara Badan Ekonomi Kreatif dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memproyeksikan ekonomi kreatif berkontribusi sebesar Rp.1.274 triliun atau 6,95% dari total PDB nasional pada akhir tahun 2020 dan dapat menyerap tenaga kerja sebesar 19,86 juta tenaga kerja tahun 2019.

Beberapa daerah di Indonesia berupaya mengoptimalkan kontribusi ekonomi kreatif untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi (Djulius et al., 2019; Ellis Susmawati et al., 2022; Ginting, 2017). Namun masih terdapat beberapa kendala dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Kendala-kendala tersebut antara lain: keuangan atau modal, pengelolaan modal kerja, akses kredit, dan literasi keuangan pemilik (Nareswari et al., 2023; Shabillia & Santoso, 2023). Selain itu, kurangnya kesadaran di kalangan pelaku kreatif tentang nilai ekraf, koordinasi yang tidak memadai serta regulasi yang kurang mendukung juga menghambat pengembangan ekraf (Saehu et al., 2023).

Kota Pekanbaru memiliki laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,78% dengan struktur perekonomian yang didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu: Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (30,76%), Konstruksi (29,10%) dan industry pengolahan (21,11%) (BPS Kota Pekanbaru, 2023). Dari ketiga sektor tersebut, ekraf memberikan kontribusi terhadap sektor perdagangan besar dan eceran. Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru tahun 2022, terdapat tiga subsektor ekraf yang dominan dan layak untuk dikembangkan yaitu: kuliner (22%), fashion (19%) dan Kriya (11%). Sub sektor kerajinan (kriya) dan kuliner mulai difokuskan pengembangannya, melalui kegiatan “Riau Street Fiesta” (Ramadhani, 2020). Namun berdasarkan studi pendahuluan, pengembangan ekraf di Kota Pekanbaru masih menghadapi beberapa kendala, seperti minimnya dukungan dari pemerintah daerah, keterbatasan modal dan keterbatasan akses pasar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menemukan strategi pengembangan kelembagaan ekraf yang tepat guna meningkatkan daya saing ekraf di Kota Pekanbaru.

Penelitian ini penting dilakukan karena keberhasilan pengembangan ekraf dapat meningkatkan kontribusi yang tinggi untuk pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Pekanbaru. Penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah daerah dan pelaku ekraf di Kota Pekanbaru

dalam upaya mengembangkan kelembagaan ekraf yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

Berbagai penelitian tentang ekonomi kreatif di Kota Pekanbaru telah banyak dilakukan, masing-masing dengan fokus yang berbeda. Ramadhani, (2021, 2021) meneliti daya saing dan inovasi produk, Arfah (2023) fokus pada pemasaran, Syahsudarmi, (2019) menganalisis peran triple helix dalam pertumbuhan industri kreatif, Lahamid, (2018) meneliti hambatan dan upaya UMKM kreatif dan Siagian & Cahyono, (2021) membahas strategi pemulihan pasca-pandemi. Penelitian ini berbeda dengan yang lain karena menganalisis kelembagaan dari semua (empatbelas) subsektor ekraf di Kota Pekanbaru dan merumuskan strategi menggunakan analisis SWOT.

Metodologi

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru selama 3 (tiga) bulan dari bulan Mei s.d Agustus 2022. Peneliti menggunakan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan karakteristik kelembagaan dan strategi pengembangan ekraf di Kota Pekanbaru. Metode pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Kuesioner disebar kepada 64 pelaku ekraf yang dipilih secara *purposive* dengan pertimbangan telah terdata secara lengkap oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru tahun 2022. Penyebaran kuesioner bertujuan untuk menggali informasi terkait karakteristik ekraf, kendala yang dihadapi dalam pengembangan usaha dan upaya yang dilakukan untuk pengembangan usaha. Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan penelitian yaitu pejabat terkait di Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Asosiasi Pelaku Ekonomi Kreatif. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi terkait kendala yang dihadapi dalam pengembangan usaha ekraf dan kebijakan yang dilakukan untuk pengembangan ekraf. Studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen, laporan dan publikasi serta artikel ilmiah terkait ekraf yang mendukung hasil penelitian.

Metode analisis data dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif dan Analisis SWOT. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data/angka untuk menggambarkan karakteristik ekraf di Kota Pekanbaru yang disajikan dalam bentuk diagram atau grafik. Hasil wawancara mendalam dilakukan dengan tahapan reduksi data, analisis data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan tantangan) yang digunakan untuk merumuskan strategi penguatan kelembagaan ekonomi kreatif di Kota Pekanbaru.

Hasil dan Pembahasan

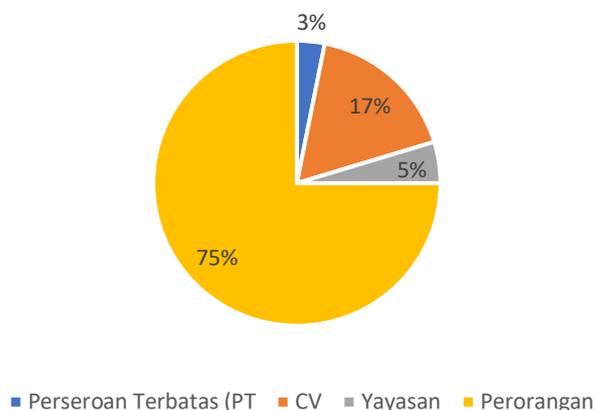
1. Karakteristik Kelembagaan Ekraf

Karakteristik kelembagaan industri kreatif di Kota Pekanbaru dalam tulisan ini ditinjau dari beberapa aspek, yaitu: bentuk badan usaha, status izin usaha, kepemilikan tempat usaha, modal usaha, bantuan yang diperoleh dan lembaga pemberi bantuan. Temuan penelitian terhadap aspek-aspek tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Bentuk Badan Usaha

Kelembagaan merupakan salah satu faktor yang menentukan daya saing ekraf (Luciana & Aldi, 2018). Dalam konteks ini, kelembagaan merujuk pada bentuk badan usaha yang memiliki kekuatan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire (CV) atau yayasan. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar ekraf di Kota Pekanbaru masih dikelola oleh perorangan (75%) (lihat Grafik 1). Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak pelaku ekraf belum memiliki kelembagaan formal yang diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing usaha mereka. Penelitian ini juga menemukan bahwa bentuk kelembagaan yang belum memiliki legalitas formal tersebut menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi oleh industri kreatif di Kota Pekanbaru untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan daya saing mereka. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Arifiyanto, (2023) dan Rian Saputra & Mutiyara, (2023) yang menyatakan bahwa bentuk badan usaha yang bersifat perorangan dan tidak memiliki kelembagaan formal akan kesulitan untuk mengakses berbagai bantuan dan melakukan kerjasama dengan stakeholder terkait.

Grafik 1. Bentuk Kelembagaan Ekonomi Kreatif



Sumber: Hasil Penelitian, 2022

1.2. Status Izin Usaha

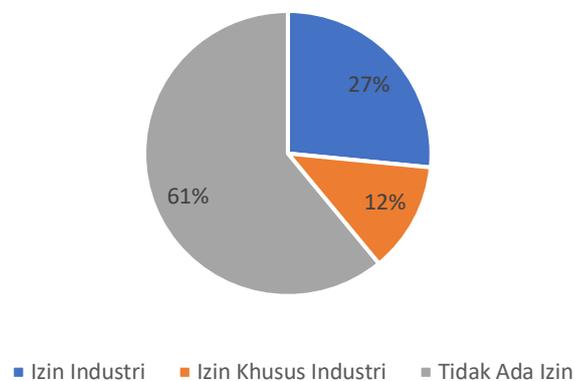
Setiap kegiatan usaha harus memiliki izin meskipun bentuk usaha tersebut merupakan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh perorangan maupun anggota keluarga sendiri. Hal tersebut diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kepemilikan izin usaha bagi UMK selain memudahkan UMK untuk mendapatkan fasilitas juga dapat menghindari UMK dari sanksi administratif. Sementara itu kewajiban izin usaha bagi UMK dapat membantu pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Hasil penelitian ini menemukan masih terdapat 61% ekonomi kreatif yang belum memiliki izin usaha (Grafik 2). Berdasarkan wawancara dengan informan dari asosiasi industri kreatif disimpulkan minimnya legalitas formal yang dimiliki para pelaku ekraf karena terkendala dalam memenuhi kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi serta terbatasnya pengetahuan terhadap pentingnya mengurus izin usaha dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sementara itu, berdasarkan wawancara dengan pejabat dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru mengemukakan untuk membantu pelaku ekonomi kreatif dalam pengurusan HKI, mereka telah memberikan sosialisasi dan melakukan fasilitasi untuk pengurusan HKI tersebut. Temuan ini sama dengan hasil penelitian Tarina, (2020). yang meneliti tentang urgensi izin

usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia. Dalam penelitiannya Tarina (2020) menemukan kendala yang dihadapi oleh UMK dalam pengurusan izin usaha terkait waktu dan prosedur pengurusan izin serta pengetahuan pelaku usaha tentang pentingnya memiliki legalitas formal. Hambatan yang sama juga ditemukan dalam penelitian ini.

1.3. Kepemilikan Tempat Usaha

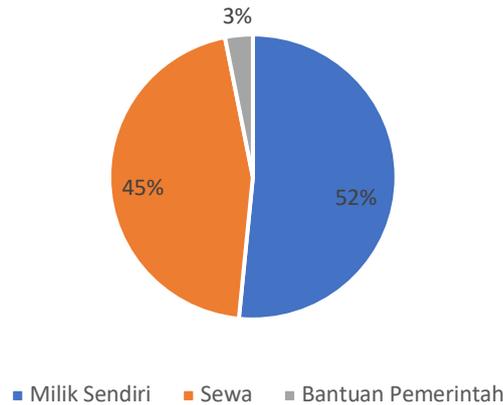
Hasil penelitian menunjukkan 52 persen ekraf memiliki tempat usaha sendiri namun demikian 45 persen ekraf masih menyewa tempat usaha. (lihat Grafik 3). Beberapa alasan yang dikemukakan pelaku ekraf lebih memilih untuk menyewa tempat usaha antara lain karena keterbatasan modal, pertimbangan akses ke fasilitas dan infrastruktur, fleksibilitas lokasi, ketersediaan tempat yang sesuai serta kepatuhan terhadap hukum dan perizinan yang berlaku. Mengacu pada Teori Hotelling, lokasi usaha mempengaruhi tingkat permintaan dan penawaran dalam usaha. Oleh karena itu menyewa tempat usaha yang dinilai strategis merupakan strategi ekraf untuk meningkatkan pendapatan usahanya. Temuan (Ruth & Hutabarat, 2015) menyatakan bahwa lokasi ekraf yang dikelompokkan dalam satu kawasan yang khas akan lebih optimal hasilnya dibandingkan ekraf yang memiliki lokasi strategis tapi tidak berkelompok. Oleh karena itu pemerintah perlu menyediakan tempat-tempat khusus menurut subsektor ekraf sehingga mudah dikenal dan diakses oleh konsumen.

Grafik 2. Status Izin Usaha Ekraf Kota Pekanbaru



Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Grafik 3. Status Kepemilikan tempat usaha Ekraf

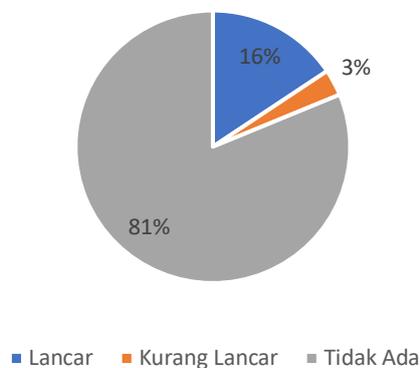


Sumber: Hasil Penelitian, 2022

1.4. Modal Usaha

Modal usaha merupakan unsur penting untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan daya saing usaha. Sektor ekraf membutuhkan modal usaha yang memadai untuk menghasilkan produk-produk kreatif yang memiliki daya saing tinggi sehingga mampu menembus pasar nasional bahkan global (Anjaningrum & Sidi, 2018). Namun banyak ekraf yang belum didukung oleh modal yang memadai (Luciana & Aldi, 2018; Rivani et al., 2019) termasuk dalam hasil penelitian ini. Grafik 4 yang menunjukkan 81 persen responden tidak memiliki pinjaman modal. Kondisi ini juga sejalan dengan karakteristik bentuk badan usaha (Grafik 1 dan status perizinan (Grafik 2). Faktor keuangan dan permodalan ini merupakan salah satu kendala yang menyebabkan belum optimalnya pengembangan sektor industri kreatif di Indonesia (Oktaviana & Bachruddin, 2017; Santoso, 2022; Tanan & Dhamayanti, 2020). Karakteristik industri kreatif yang unik dan beresiko menyebabkan sulit memperoleh permodalan sehingga mayoritas pelaku harus memodali usahanya sendiri. Namun hasil temuan Rafika et al., (2022), akses terhadap modal bukan satu-satunya permasalahan terkait modal namun persoalan lain yang kerap terjadi yaitu terkait kemampuan dalam mengelola modal secara optimal.

Grafik 4. Ekraf Kota Pekanbaru berdasarkan Status Pinjaman

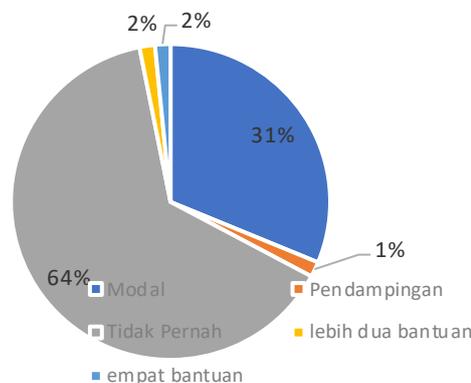


Sumber: Hasil Penelitian, 2022

1.5. Bantuan yang Diperoleh

Ekraf membutuhkan bantuan baik materiil dan non materiil dari pemerintah dan stakeholders untuk mengembangkan usahanya. Namun bantuan yang diberikan umumnya terbatas dalam bentuk bantuan modal tanpa diikuti dengan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan (Mahira, 2019) maupun fasilitasi perlindungan hukum terkait hak cipta (Santoso, 2022). Hasil penelitian menemukan 64 persen responden pelaku ekraf tidak pernah memperoleh bantuan baik dalam bentuk modal maupun pendampingan (lihat Grafik 5.). Hasil temuan lapangan menunjukkan kelengkapan administrasi yang dimiliki seperti legalitas badan usaha maupun perizinan menjadi kendala utama para pelaku industri kreatif memperoleh bantuan. Selain itu juga disebabkan oleh keterbatasan akses informasi para pelaku ekraf terhadap sumber bantuan yang ditawarkan oleh pemerintah dan stakeholders terkait. Sementara itu dari aspek pemerintah daerah, keterbatasan anggaran masih menjadi kendala dalam mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan dan meningkatkan daya saing ekraf.

Grafik 5. Ekraf Kota Pekanbaru Menurut Bantuan yang Diperoleh

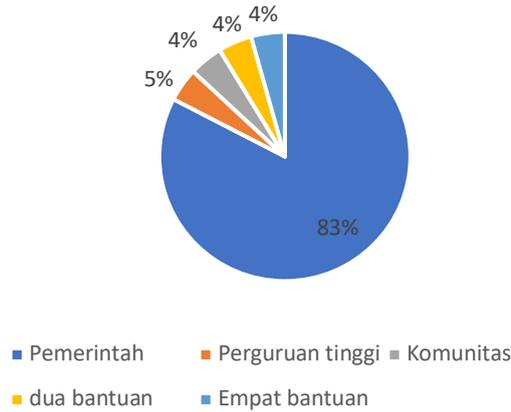


Sumber: Hasil Penelitian 2022

1.6. Lembaga Pemberi Bantuan

Kolaborasi antar pihak seperti pemerintah, swasta dan akademisi sangat dibutuhkan dalam mengembangkan ekonomi kreatif (Aswin et al., 2022). Kolaborasi diharapkan dapat mewujudkan sinergitas program antar stakeholders dalam memberikan bantuan materiil dan nonmateriil kepada ekraf sehingga dapat mencapai tujuan yang optimal (Dewandaru, 2016). Pemberian bantuan diharapkan dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh ekraf seperti permodalan, peralatan, manajemen pengelolaan usaha dan keuangan, pemasaran dan lainnya (Tanan & Dhamayanti, 2020). Grafik 6 menunjukkan, Lembaga pemberi bantuan kepada ekraf sebagian besar (83%) masih berasal dari pemerintah. Oleh karena itu pihak terkait lain seperti Lembaga keuangan, swasta dan akademisi perlu didorong untuk memberikan kontribusinya dalam pengembangan dan peningkatan daya saing ekraf di Kota Pekanbaru.

Grafik 6. Ekraf Kota Pekanbaru menurut Lembaga Pemberi Bantuan



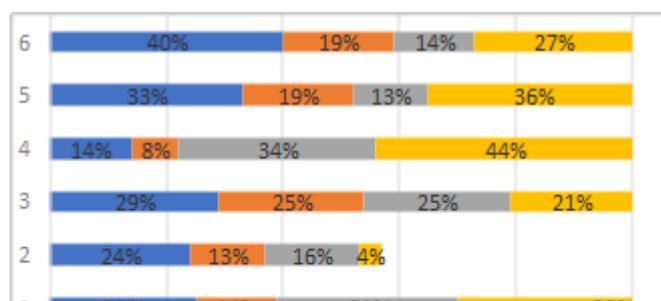
Sumber: Hasil Penelitian, 2022

2. Kendala Kelembagaan Ekraf

Kendala kelembagaan ekraf di Kota Pekanbaru ditinjau dari aspek kelembagaan terkait dengan permasalahan legalitas organisasi yang belum baik. Kondisi ini dapat dilihat dari karakteristik responden yang sebagian besar belum memiliki legalitas kelembagaan formal, belum memiliki izin usaha dan masih dikelola secara perorangan. Padahal legalitas organisasi dan perizinan ekraf merupakan komponen yang sangat penting dimiliki oleh ekraf untuk menjamin perlindungan hukum usahanya, memudahkan pelaku ekraf untuk mengakses permodalan, memperoleh bantuan dan pembinaan dari pemerintah maupun stakeholder terkait. Selain itu kepemilikan legalitas usaha oleh ekraf memudahkan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan pembinaan (Rian Saputra & Mutiyara, 2023; Tarina, 2020).

Selanjutnya kendala kelembagaan lainnya yang menjadi temuan penelitian ini adalah belum optimalnya dukungan pemerintah dalam melakukan pengembangan kelembagaan ekraf (lihat Grafik 7). Grafik 7 menunjukkan sebagian besar responden menilai bahwa dukungan pemerintah dalam memajukan usaha khususnya pemberian izin usaha berada pada kriteria sangat tidak baik (37%) dan tidak baik (29%). Demikian juga dengan dukungan pemerintah dalam memberikan kemudahan pengurusan izin usaha berada pada kriteria sangat tidak baik (40%) dan tidak baik (27%). Temuan ini mengindikasikan adanya kendala regulasi dan birokrasi yang harus dihadapi oleh pelaku ekraf. Oleh karena itu pemerintah perlu memperbaiki proses perizinan dan mengurangi hambatan birokrasi, dengan langkah-langkah konkret seperti meningkatkan transparansi dan mempercepat prosedur administrasi. Perbaikan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perkembangan ekonomi kreatif, yang pada gilirannya dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian. Selain itu dari aspek pemerintah, beberapa keterbatasan seperti masalah keterbatasan anggaran dan ketersediaan database UKM ekraf.

Grafik 7. Ekraf Kota Pekanbaru menurut Kendala Kelembagaan



Sumber: Hasil Penelitian, 2022

Keterangan: 1. Organsiasi dikenal pasar, dan memiliki brand yang marketable, 2. ketersediaan peraturan pelaksanaan pengelolaan administrasi dan dana termasuk SOP, 3. Biaya administrasi perizinan, pengurusan HKI& pendirian usaha, 4. memiliki perencanaan bisnis yang sesuai dengan perkembangan IPTEKS, 5. Memiliki struktur organisasi secara jelas mengakomodir semua aktivitas organisasi, 6. perusahaan/organisasi/Badan Usaha memiliki izin lengkap.

3. Faktor Internal dan Eksternal Pengembangan Kelembagaan Ekraf di Kota Pekanbaru

Faktor-faktor internal yang mempengaruhi perkembangan kelembagaan ekraf di Kota Pekanbaru dibedakan menjadi kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yang dimiliki ekraf terdiri dari: 1. meningkatnya minat pelaku ekraf, 2. ketersediaan Sumber Daya Manusia yang kompeten 3. menggunakan teknologi informasi. Ekonomi kreatif merupakan sektor yang sangat menjanjikan untuk mendukung pembangunan ekonomi (Panova et al., 2022). Pertumbuhan industri kreatif yang cukup pesat menunjukkan terjadinya peningkatan minat pelaku ekonomi kreatif (Kuznetsov et al., 2022; Pratomo et al., 2021). Salah satu faktor pendorog ekonomi kreatif adalah ketersediaan SDM yang kompeten mendukung dalam penciptaan kualitas desain, produksi, manajemen dan pemasaran yang efektif dan teknologi yang memungkinkan tumbuhnya inovasi, efisiensi operasional dan akses pasar yang lebih luas (Kuznetsov et al., 2022).

Sebaliknya kelemahan dalam pengembangan kelembagaan ekraf di Kota Pekanbaru, salah satunya adalah belum tersedianya database ekraf yang terintegrasi. Hasil studi kualitatif menemukan belum tersedianya database ekraf menyulitkan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk pertama: memetakan kebutuhan sektor ekraf secara tepat, kedua: menyusun perencanaan program pengembangan ekraf yang tepat sasaran. Kelemahan lainnya adalah sebagian besar ekraf di Kota Pekanbaru belum memiliki legalitas kelembagaan dan perizinan khususnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perlindungan hukum menjamin hak, manfaat, dan kepastian bagi pelaku industri kreatif dan mendukung pengembangan ekonomi kreatif (Chen et al., 2013; Suryansyah, 2019). Namun sebagian besar industri kreatif belum memiliki legalitas formal (Ginting, 2017; Suryansyah, 2019). Selanjutnya belum adanya legalitas kelembagaan formal dan perizinan menghambat pelaku ekraf dalam memperoleh modal dan akses modal. Meskipun minat pelaku ekraf meningkat namun tanpa dukungan modal menyebabkan ekraf sulit berkembang. Terakhir, belum optimalnya dukungan pemerintah baik dalam bentuk regulasi, pendanaan maupun pendampingan membuat pelaku ekraf sulit dalam memenangkan persaingan. Padahal pemerintah memainkan peranan penting dalam pengembangan ekonomi kreatif (Fazlagić & Szczepankiewicz, 2020; Goto, 2017).

Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan kelembagaan ekraf di Kota Pekanbaru dibedakan menjadi peluang dan tantangan. Peluang pengembangan ekraf mencakup: pertama, meningkatnya minat konsumen terhadap produk ekraf yang menunjukkan potensi pasar yang cukup besar. Peningkatan minat tersebut juga didukung oleh digitalisasi pemasaran dan promosi serta inovasi produk (Fakhriyyah et al., 2022; Izzah Nur Masyithoh & Ivo Novitaningtyas, 2021). Kedua peluang kerjasama yang semakin terbuka, antara pemerintah, swasta, akademisi dan komunitas. Kolaborasi tersebut memungkinkan pelaku ekraf mengakses sumberdaya, pendampingan, teknologi dan pengetahuan baru. Ketiga, potensi dukungan dari stakeholders terkait memberikan peluang dalam memperkuat kelembagaan dan daya saing ekraf. Sebaliknya faktor-faktor yang mengancam pengembangan ekraf dan perlu mendapat perhatian, terdiri dari: 1. perubahan preferensi konsumen, 2. produk yang mudah ditiru, 3. perubahan regulasi. Perubahan preferensi konsumen mendorong ekraf beradaptasi dan berinovasi untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan selera pasar yang dinamis. Sementara itu produk yang mudah ditiru merupakan permasalahan utama ekraf sehingga perlu ada perlindungan terhadap produk kreatifnya (Disemadi & Kang, 2021).

4. Strategi Pengembangan Kelembagaan Ekraf di Kota Pekanbaru

Berdasarkan karakteristik dan permasalahan ekraf di Kota Pekanbaru, penelitian ini merumuskan beberapa strategi kebijakan yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan kelembagaan dalam pengembangan ekraf di Kota Pekanbaru. Beberapa kebijakan tersebut antara lain: *Pertama*, memperkuat edukasi dan kesadaran tentang legalitas kelembagaan ekraf melalui sosialisasi, workshop dan pelatihan terkait proses pendirian dan aspek hukum bagi pelaku ekraf. *Kedua*, memperbaiki pelayanan dan fasilitasi kemudahan perizinan usaha ekonomi kreatif dari berbagai aspek baik dari legalitas, kelembagaan maupun kerjasama. *Ketiga*, memfasilitasi dan memperkuat kerjasama kemitraan di berbagai bidang terutama permodalan dan pemasaran bagi pelaku usaha melalui Kerjasama dengan Lembaga keuangan/permodalan dalam memberikan kemudahan modal kepada pelaku kreatif yang mendapat rekomendasi dari pemerintah kota Pekanbaru. Dan *keempat*, Membangun database industri dan produk kreatif kota Pekanbaru yang lengkap dan terupdate melalui pemetaan pelaku, industri dan potensi produk ekonomi kreatif secara lengkap di Kota Pekanbaru dan Penyusunan portal/data base pusat informasi ekonomi kreatif kota Pekanbaru.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan kendala kelembagaan serta merumuskan strategi pengembangan kelembagaan ekraf di Kota Pekanbaru menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan terdapat tiga kendala utama pengembangan kelembagaan ekraf di Kota Pekanbaru. Ketiga kendala tersebut terkait dengan masalah legalitas kelembagaan, perizinan, permodalan ekraf dan dukungan pemerintah yang belum optimal. Ketiga permasalahan tersebut merupakan permasalahan umum yang terjadi pada sebagian besar industri ekraf di Indonesia.

Hal yang menarik dari temuan ini adalah belum tersedia database ekonomi kreatif di Kota Pekanbaru sehingga hal ini memungkinkan dukungan pemerintah terhadap pengembangan industri kreatif dianggap belum optimal. Ketersediaan database ekraf memudahkan pemerintah dan stakeholders terkait dalam memberikan intervensi dan dukungan baik dalam bentuk saranan prasarana, permodalan maupun pendampingan serta memudahkan dalam melakukan pengawasan. Berdasarkan hasil penelitian ini, kami

merekomendasikan peningkatan peran pemerintah daerah khususnya SKPD terkait dalam melakukan pendampingan, pembinaan dan edukasi kepada pelaku ekonomi kreatif terutama dalam hal legalitas produk dan kelembagaan, meningkatkan pelayanan dan fasilitasi perizinan usaha, mendorong dan memfasilitas kerjasama dan kolaborasi pelaku keonomi kreatif serta membangun database ekonomi kreatif yang *valid* dan *up to date*.

Ucapan Terima Kasih dan Penyandang Dana

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru yang telah mendanai penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Tim Peneliti dari Universitas Islam Riau (UIR) yang berkontribusi dalam penelitian dan atau penulisan artikel ini.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan dalam penelitian dan penulisan artikel ini.

Referensi

- Anjaningrum, W. D., & Sidi, A. P. (2018). *Jurnal Ekonomi Modernisasi*. 14(1), 40–56.
- Arfah, L. (2023). Analisis Performa Pemasaran pada Industri Kreatif di Pekanbaru (Studi Empiris pada Pusat Oleh-oleh Khas Riau). *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, 3(2), 634–646.
- Arifiyanto, J. (2023). Company Forms in Digital Economy Era. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 2(1), 47–52. <https://doi.org/10.32734/nlr.v2i1.11512>
- Aswin, A., Ariesmansyah, A., & Indriane, M. (2022). Collaborative Governance Model in the Development Center of Economic Empowerment and Community Creativity in Bandung City. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 1(5), 1189–1208. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v1i5.1071>
- Chen, Y. S., Lin, D. W., Hsu, Y. L., & Chang, P. L. (2013). Legal Safeguard from Intellectual Property Rights of Cultural Creative Industry. *Applied Mechanics and Materials*, 311, 305–309. <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.311.305>
- Dewandaru, B. (2016). Strategi Dalam Memajukan Industri Kreatif Dan Pengembangan Ekonomi Lokal Sebagai Daya Tarik Wisata (Studi Pada Kesenian Jaranan di Kota Kediri). *Jurnal Ekonomi Universitas Kediri*, 1(2), 170–187.
- Djulius, H., Juanim, J., Wongyu, C., & Santy, R. D. (2019). Creative Industry, Creative City and Creativity Spillover in Indonesia: Preliminary research. *Proceedings of the 1st International Conference on Economics, Business, Entrepreneurship, and Finance (ICEBEF 2018)*. Proceedings of the 1st International Conference on Economics, Business, Entrepreneurship, and Finance (ICEBEF 2018), Bandung, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/icebef-18.2019.77>
- Ellis Susmawati, Sugiono, & Subagyo. (2022). Creative Economic Development Strategies and Contributions to the Economic Development of Kediri City 2016-2019. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 2(1). <https://doi.org/10.55227/ijhess.v2i1.216>

- Fakhriyyah, D. D., Susanti, Y., & Laili, S. S. (2022). Pengembangan Inovasi Produk dan Penggunaan Digital Marketing sebagai Upaya Peningkatan Penjualan UMKM Makanan. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 3(1), 9. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v3i1.13198>
- Fazlagić, J., & Szczepankiewicz, E. I. (2020). The Role of Local Governments in Supporting Creative Industries—A Conceptual Model. *Sustainability*, 12(1), 438. <https://doi.org/10.3390/su12010438>
- Ginting, A. M. (2017). *Strategi pengembangan ekonomi kreatif di provinsi jawa barat (the development strategy of creative economic in the west java province)*. 22(1).
- Goto, K. (2017). Why Do Governments Financially Support the Creative Industries? In S. Hemels & K. Goto (Eds.), *Tax Incentives for the Creative Industries* (pp. 21–31). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-287-832-8_3
- Hendrawan, Y. F. (2022). Analisis Kontribusi Subsektor Industri Kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Tulungagung. *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 17. <https://doi.org/10.31602/iqt.v7i1.4035>
- Izzah Nur Masyithoh & Ivo Novitaningtyas. (2021). Pengaruh Digital Marketing terhadap Minat Beli Konsumen pada Marketplace Tokopedia. *Jurnal Manajemen & Bisnis Kreatif*, 7(1). <https://doi.org/10.36805/manajemen.v7i1.1951>
- Kuznetsov, N., Tyaglov, S., Ponomareva, M., Rodionova, N., & Sapegina, K. (2022). Development Priorities for the Regional Innovation System Based on the Best Available Technologies. *Sustainability (Switzerland)*, 14(3). Scopus. <https://doi.org/10.3390/su14031116>
- Lahamid, Q. (2018). Hambatan dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berbasis Syariah di Kota Pekanbaru. *Jurnal Sosial Budaya*, 15(1).
- Luciana, M., & Aldi, E. (2018). Analisis Daya Saing Industri Kreatif (Studi Kasus Di DKI Jakarta). *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, IX(1), 1–21.
- Mabrur, Y., Sarma, M., & Baga, L. M. (2023). Development Strategy of Bekasi Creative Hub (BCH) when Developing Bekasi City's Creative Economy. *JURNAL MANAJEMEN AGRIBISNIS (Journal Of Agribusiness Management)*, 11(01), 199. <https://doi.org/10.24843/JMA.2023.v11.i01.p16>
- Mahira, E. D. (2019). *Strategi dalam memajukan industri kreatif dan pengembangan ekonomi lokal*. 2(1), 72–78.
- Nareswari, N., Nurmasari, N. D., & Putranti, L. (2023). Financial Constraints of Micro, Small, and Medium-sized Enterprises (MSMEs) in the Indonesia Creative Industries. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 25(3), 312–321. <https://doi.org/10.14414/jebav.v25i3.3433>
- Oktaviana, O., & Bachruddin, D. T. (2017). Kebijakan Peningkatan Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif Bagi Perekonomian di Provinsi Banten. *Prosiding Seminar Nasional Riset Terapan | SENASSET, November*, 88–93.
- Panova, I., Stepenenko, V., & V. N. Karazin Kharkiv National University. (2022). Theoretical Fundamentals of Creative Economics Research. *Herald of Khmelnytskyi National University. Economic Sciences*, 306(3), 213–217. <https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-306-3-31>

- Pratomo, S., Ashar, K., & Satria, D. (2021). Role of Creative Economy on Local Economic Development. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 9(2), 27–35. <https://doi.org/10.21776/ub.JIAE.009.02.4>
- Rafika, N., Intihayah, N., & Sugiyanto, E. K. (2022). Jurnal Ekonomika dan Bisnis. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 9(1), 195–208.
- Ramadhani, S. A. (2020). Analisis Daya Saing Ekonomi Kreatif di Kota Pekanbaru. 6(1).
- Ramadhani, S. A. (2021). Analisis inovasi produk pada ekonomi kreatif sektor kerajinan galeri Batik Tabir Riau di Kota Pekanbaru. *SYNERGY: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 1(1), 11–15. <https://doi.org/10.52364/synergy.v1i1.2>
- Rian Saputra, & Mutiyara, S. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Guna Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kota Banjarmasin. *AN NUQUUD*, 2(1), 40–47. <https://doi.org/10.51192/annuquud.v2i1.429>
- Rivani, R., Rizal, M., & Darwis, R. S. (2019). Analysis of Financing Characteristics for Creative Industries in Bandung City. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan Vol.4*, 4(1), 7373–7384.
- Ruth, L. B., & Hutabarat, F. W. M. (2015). Strategi Pengembangan Usaha Kuliner di Kota Malang Berbasis Ekonomi Kreatif. *JESP*, 7(1), 12–20.
- Saeu, Muh. S., Ansori, A., Suharto, S., Purnamasari, D. P., & Simbolon, G. (2023). Realizing the Narrative: Higher Education Strategies as Creative Economy Agents in Indonesia. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 15(2), 1471–1479. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v15i2.3079>
- Santoso, R. (2022). Disrupsi Pandemi dan Strategi Pemulihan Industri Kreatif. *JMK (Jurnal Manajemen Kewirausahaan)*, 7(1), 48–58.
- Shabillia, L., & Santoso, B. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 737–746. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2871>
- Siagian, A. O., & Cahyono, Y. (2021). Strategi Pemulihan Pemasaran UMKM di Masa Pandemi Covid-19 Pada Sektor Ekonomi Kreatif. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(1), 206–217. <https://doi.org/10.47233/jitekssis.v3i1.212>
- Sung, T. K. (2015). The creative economy in global competition. *Technological Forecasting and Social Change*, 96, 89–91. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2015.04.003>
- Suryansyah, S. (2019). Legal Protection on Intellectual Property Rights in the Development of Creative Economy in Mamuju Regency. *Substantive Justice International Journal of Law*, 2(1), 54. <https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v2i1.30>
- Sutra Disemadi, H., & Kang, C. (2021). Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 54. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31457>
- Syahsudarmi, S. (2019). Peran Triple Helix dalam Mendorong Ekonomi Kreatif UMKM di Kota Pekanbaru. *Jurnal Daya Saing*, 5(2), 88–99. <https://doi.org/10.35446/dayasaing.v5i2.343>
- Tanan, C. I., & Dhamayanti, D. (2020). Pendampingan UMKM dalam Pengelolaan Keuangan Usaha Guna Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Distrik Abepura Jayapura. *Amalee:*

Indonesian Journal of Community Research and Engagement, 1(2), 173–185.
<https://doi.org/10.37680/amalee.v1i2.408>

Tarina, A. (2020). Urgensi izin usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik bagi usaha mikro dan kecil. *Jurnal Pelita Ilmu*, 14(2), 88–100.